

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi dalam skala rumah tangga melalui usaha pemanfaatan lahan pekarangan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang telah peneliti paparkan pada bab V, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Pangan Kota Padang sudah terlaksana namun belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala atau masalah yang dihadapi implementor dalam pelaksanaannya. Adapun yang menghambat kinerja implementasi program KRPL di Kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Sumber Daya

Dalam variabel sumber daya ini, pada indikator sumber daya manusia, Dinas Pangan Kota Padang mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan program KRPL. Hal ini dilihat dari sedikitnya pegawai Dinas Pangan Kota Padang yang terlibat dalam pelaksanaan program KRPL yang hanya berjumlah 5 orang. Ditambah lagi dengan tidak adanya tenaga penyuluh pertanian yang berfungsi sebagai

pendamping kelompok KRPL di lapangan. Selain itu, pada indikator sumber daya non-manusia (finansial), kendalanya ialah kurangnya dukungan anggaran untuk implementasi program KRPL ini. Hal ini dilihat dari tidak adanya honor untuk pendamping setelah kelompok tidak lagi mendapat bantuan dan juga tidak adanya honor bagi pendamping kelompok yang dibantu dengan dana APBD provinsi atau kota.

2. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Penyelenggaraan

Pada variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas penyelenggaraan ini khususnya pada indikator koordinasi terdapat kendala masih kurang optimalnya koordinasi yang dilakukan Dinas Pangan Kota Padang dengan pihak lain yang terkait. Hal ini dilihat dari tidak adanya koordinasi dengan camat yang menurut pedoman harusnya ada. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Padang juga belum optimal dikarenakan Dinas Pangan Kota Padang terkadang langsung saja menghubungi penyuluh yang bersangkutan.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Adapun kendala atau masalah dalam variabel ini dapat dilihat pada indikator kondisi ekonomi masyarakat khususnya kelompok wanita yang menjadi kelompok KRPL belum begitu mendukung untuk berhasilnya program KRPL di Kota Padang. Kondisi ekonomi masyarakat perkotaan yang sering memiliki kegiatan di luar rumah sehingga menyebabkan kurang aktifnya anggota kelompok KRPL. Sedangkan kendala pada indikator sosial adalah masih kurang mendukungnya kondisi sosial

masyarakat khususnya yang menjadi kelompok KRPL untuk berhasilnya program KRPL secara berkelanjutan. Hal ini dilihat dari banyak masyarakat yang masih memiliki pola pikir bahwa program ini dijalankan hanya saat ada bantuan saja.

4. Disposisi Implementor

Sedangkan pada variabel ini, kendalanya terdapat pada indikator intensitas disposisi implementor dimana sebagian penyuluh memiliki kecenderungan seperti kurang totalitas dalam keterlibatannya di program KRPL ini. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya atau tidak adanya honor, kurangnya jumlah penyuluh, atau kurang optimalnya koordinasi.

6.2. Saran

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja program KRPL di Kota Padang, peneliti mengemukakan beberapa saran kepada implementor untuk dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan dukungan sumber daya dalam pengimplementasian program KRPL di Kota Padang apakah itu sumber daya manusia ataupun sumber daya finansial. Karena dengan sumber daya yang mendukung akan terbuka peluang yang sangat besar untuk berhasilnya program ini.
2. Dinas Pangan Kota Padang sebaiknya juga mengadakan koordinasi dengan camat sehingga pihak kecamatan juga dapat mendukung secara penuh untuk pelaksanaan program KRPL di wilayahnya. Dinas Pangan juga

sebaiknya lebih intensif dalam hal koordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Padang sehingga tidak ada penyuluh yang setengah hati.

3. Pendamping diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam mendampingi dan memotivasi kelompok masyarakat sehingga seluruh anggota kelompok masyarakat tetap bersemangat untuk terus mengembangkan pekarangannya baik itu sewaktu masih mendapatkan bantuan maupun setelah tidak adanya bantuan.
4. Dinas Pangan Kota Padang diharapkan mampu untuk terus melakukan pengawasan dan mengevaluasi kelompok-kelompok KRPL secara rutin dan intensif sehingga tidak banyak kelompok yang mati atau tidak aktif lagi.

